

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara independen yang memiliki politik luar negeri bebas aktif. Prinsip bebas aktif ini menjadi asas dan poros bagi pemerintah Indonesia terhadap arah kebijakan-kebijakan luar negeri yang akan dikeluarkan. Secara historis, politik luar negeri yang berprinsip bebas aktif ini merupakan hasil dari pemikiran Mohammad Hatta. Sedangkan menurut harfiah, makna dari prinsip bebas aktif ini adalah kondisi dimana Indonesia bebas untuk memilih menjadi negara non blok dan ikut aktif dalam hal-hal yang berhubungan dengan hubungan antar negara, baik dalam lingkup regional maupun internasional (Safaat, Public Relations dalam Politik Luar Negeri Indonesia , 2012, hal. 122). Indonesia dibawah pemerintahan presiden Jokowi menerapkan politik luar negeri yang bebas aktif dengan berdasarkan kepentingan nasional Indonesia. Tercantum dalam nawacita poin pertama bahwa Jokowi menjadikan politik luar negeri sebagai upaya atau usaha untuk meningkatkan ketahanan nasional, agenda pembangunan, dan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Indonesia melalui prinsip bebas aktifnya juga memprioritaskan agenda-agenda nasional seperti meningkatkan investasi asing dan mempererat diplomasi ekonomi dengan negara-negara yang lain.

Prioritas itu dibuktikan oleh Jokowi dengan banyaknya hubungan kerjasama bilateral maupun multilateral baik di bidang pembangunan ekonomi, pendidikan, maupun keamanan dan pertahanan. (Effendi, 2017)

Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam banyak menjalin kerjasama dengan negara-negara Islam yang berada di wilayah timur tengah yang dalam hal ini khususnya adalah Qatar. Mengingat usia hubungan diplomatik antara Indonesia dan Qatar sudah terjalin sejak tahun 1976, hubungan bilateral kedua negara semakin membaik dari tahun ke tahun. Kerjasama dalam bidang politik dapat dilihat dari banyaknya kunjungan yang dilakukan oleh kedua Negara. Kunjungan Utusan Khusus Presiden untuk Timur Tengah, Dr. Alwi Shihab dan para pengusaha ke Qatar untuk mengadakan pertemuan dengan penasehat Menteri Energi dan Industri, serta pengusaha Qatar Mining, 13 – 14 Juni 2011. Pertemuan ini berlanjut pada 12-16 Oktober 2016. (Kementerian Luar Negeri Indonesia, hal. 105-106) Tidak hanya itu, hubungan politik yang baik kedua negara di antaranya ditandai juga dengan kehadiran Wakil PM H.E. Ahmed bin Abdullah bin Zaid Al Mahmoud pada penyelenggaraan UNAOC di Bali, 29-30 Agustus 2014. Pada tanggal 2 Agustus 2016, Menteri Ekonomi dan Perdagangan Qatar, Y.M. Sheikh Ahmed Bin Jassim Al-Thani melakukan kunjungan ke Indonesia dengan sekaligus menghadiri acara Konferensi Tingkat Tinggi *World Islamic Economic Forum* 2016. Sedangkan pada awal tahun 2017, Delegasi Komisi I

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang dipimpin oleh Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari melakukan pertemuan dengan Ketua Komisi Dalam Negeri dan Luar negeri serta Pengawas Parlemen Qatar (Majlis as-Shura) yang dipimpin H.E. Muhamad Abdullah Al-Sulaiti di Doha. (Direktorat Informasi dan Media, dan Biro Administrasi Menteri, 2015)

Selain itu, dalam bidang kerjasama ekonomi ditunjukkan dengan adanya peningkatan kerjasama antara Indonesia dan Qatar dalam perdagangan dan investasi. Untuk mendukung diplomasi ekonomi, KBRI melakukan pendekatan dengan kalangan pemerintah dan dunia usaha Qatar, termasuk *Qatar Chamber of Commerce and Industry*. Selain itu pada 2015 silam pemerintah Indonesia melakukan kesepakatan untuk menandatangani rencana perjanjian kerja sama mengenai adanya bebas visa untuk pihak yang memegang dan memiliki paspor dinas dan diplomatik, pembentukan *Join Investment Company* senilai 1 Milyar dollar, pembangunan pembangkit tenaga listrik antara PT. Pembangkit Jawa Bali dengan *Nebras Power* dan memberikan investasi seharga 500 Juta dollar di Belawan, Sumatera Utara serta rencana untuk melakukan pengembangan investasi di Qatar dalam bidang pertanian dan infrastruktur. Tidak hanya Indonesia, Qatar pun telah menyusun dan merencanakan beberapa program-program mengenai kerjasama dalam perdagangan dan investasi melalui kunjungan wisman ke Indonesia. Hal ini diupayakan untuk mendorong finalisasi dan agenda

untuk menandatangani *Air Service Agreement Indonesia-Qatar*. Upaya tersebut diwujudkan dengan melalui kerja sama dengan perusahaan *Qatar Airways* untuk mendorong masuknya wisman dan meningkatkan ekspor Indonesia ke Qatar. Selain itu, dalam pertengahan 2016, KBRI Doha meresmikan penandatanganan MOU kerja sama kadin Qatar dengan kadin Indonesia. Hal itu diupayakan agar berbagai program pertemuan usaha dapat dilakukan seperti adanya partisipasi yang tinggi untuk menghadiri kegiatan *ASEAN-Qatar Chamber Joint Seminar* dengan melibatkan banyak pengusaha dari Indonesia. Pada akhir tahun 2016, BUMN Qatar yaitu Nebras Power meningkatkan investasinya di Indonesia dengan mengakuisisi 35,5% saham PT Paiton Energy senilai USD 1,35 Milyar. Dalam programnya, Nebras Power akan membangun pembangkit listrik di Belawan Sumatera Utara senilai USD 750. (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2016). Di bidang ini Indonesia terus mengupayakan peningkatan pengiriman tenaga kerja ahli Indonesia (perawat dan pertambangan) ke Qatar. Di tahun 2011 ini, kedua negara sepakat membahas draft MoU penempatan tenaga kerja ahli Indonesia ke Qatar. Selama paruh pertama tahun 2011, terdapat 552 kasus yang menimpa TKI Indonesia yang bekerja di Qatar. Selama tahun 2011, Pemri telah berhasil memenangkan tuntutan utang darah (diyat) dari keluarga pembunuhan dua orang WNI (PLRT) yaitu Alm. Yayah Salsiah bt Zunaedi dan Alm. Oom Komariah bt Kamid Casem. Pada 25 Mei 2016, pemerintah Qatar melakukan

penambahan kuota bagi Tenaga Kerja Indonesia yang terampil sebanyak 24 ribu orang. Aspek pariwisata pun tidak ketinggalan dalam kerja sama yang dilakukan oleh kedua belah pihak, KBRI yang ada di Doha berusaha untuk mengupayakan promosi pariwisata yang berisikan tampilan salah satu iklan Indonesia yaitu Wonderful dalam tayangan TV Al-Jazeera sebanyak ribuan kali yaitu 7. 884 kali hingga pada akhir tahun 2016. Tidak hanya itu, Indonesia juga mendapatkan banyak kunjungan wisata dari Qatar dan melalui kerjasama dengan *Qatar Airways*. Hal ini ditunjukkan untuk meningkatkan perekonomian kedua negara(Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2016)

Selain kerjasama di bidang ekonomi dan politik, Indonesia juga memiliki hubungan kerjasama di bidang keagamaan dengan Qatar. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penandatanganan MoU Kemenag dengan Qatar Charity Indonesia dilakukan oleh Karo KLN Kemenag Achmad Gunaryo dengan Direktur Qatar Charity Karam Zain Aly di depan Sekjen Kemenag Nur Syam, di Kantor Kementerian Agama Lapangan Banteng Barat 3-4 Jakarta, pada januari 2015. Dalam penandatanganan tersebut juga hadir Sekretaris Ditjen Bimas Islam Muhammadiyah Amin, Kakanwil Jabar, Aceh, Banten, DKI Jakarta, dan Yogyakarta serta pejabat Kemenag lainnya. Adapun pada tanggal 29 April-3 Mei 2016 diadakan pertemuan Ketua DDII yaitu Muhammad Siddik dengan didampingi oleh Wakil Ketua DDII yaitu Abdul Wahid Alwi dan Direktur Eksekutif Lazis Dewan

Dakwah Ade Salamun ke Qatar melakukan kerja sama dalam bidang dakwah di antara kedua negara yaitu Indonesia dan Qatar.

Namun, kekhawatiran Indonesia akan menurunnya kerja sama antara Indonesia dan Qatar dimulai ketika Arab Saudi dan negara teluk lainnya termasuk Bahrain, dan UEA memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar pada 5 Juni tahun 2017. Pemutusan hubungan diplomatik tersebut dikarenakan adanya kesalah fahaman antara Qatar dan Saudi, dimana Saudi melontarkan tuduhan bahwa Qatar mendukung gerakan Islam Ikhwanul Muslimin dan Hizbullah, serta adanya kedekatan yang lebih serius dengan Iran yang merupakan musuh dari Arab Saudi karena bermazhab Syiah. (BBC Indonesia, 2017)

Adanya konflik diputuskannya hubungan diplomatik oleh negara Arab Saudi dan negara teluk lainnya tidak disetujui oleh Qatar. Hal ini dikarenakan, adanya tuduhan yang tidak benar dari Saudi. Namun, respon Qatar tidak menjadikan krisis diplomatik tersebut berakhir. Konflik ini pun menjadi sorotan di dunia Internasional, hal itu terlihat dari banyaknya negara yang terlibat dalam penyelesaian krisis diplomatik Qatar. Salah satunya adalah Turki yang melibatkan diri secara langsung untuk menyelesaikan konflik tersebut. Presiden Erdogan telah menyatakan sikapnya untuk mendukung secara penuh terhadap Qatar dan menjadikan negaranya siap membantu untuk menyelesaikan krisis diplomatik yang terjadi di negara-negara teluk tersebut. Dukungan

Turki terlihat dari banyaknya bantuan materi seperti bahan pokok yang dikirimkan untuk masyarakat di Qatar dan membahas penyelesaian krisis diplomatik dengan pemerintah-pemerintah negara teluk lainnya, seperti Arab Saudi dan Kuwait. (BBC News, 2017)

Krisis diplomatik Qatar ini juga menjadi sorotan bagi Indonesia. Mengingat banyaknya hubungan kerjasama yang sudah terjalin lama dengan Qatar, Indonesia pun melakukan berbagai tindakan untuk menghadapi krisis tersebut. Hal inilah yang menarik penulis untuk meneliti lebih jauh lagi tentang sikap Indonesia terhadap krisis diplomatik Qatar.

Untuk itu, dalam penulisan proposal skripsi ini akan lebih membahas tentang Kebijakan Indonesia dalam menghadapi krisis diplomatik Qatar di Timur Tengah tahun 2017.

### **B. Rumusan Masalah**

“Bagaimana kebijakan Indonesia dalam menghadapi krisis diplomatik Qatar yang berada di kawasan Timur Tengah tahun 2017?”

### **C. Kerangka Teori**

Untuk memudahkan penulis menjawab rumusan masalah diatas, maka penulis membutuhkan konsep untuk digunakan sebagai kerangka dasar berfikir. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Konsep politik luar Negeri dan konsep

#### **1. Konsep Politik Luar Negeri**

Secara umum, politik luar Negeri (*foreign policy*) adalah suatu perangkat sikap, nilai, maupun arah

yang bertujuan untuk mengamankan serta mempertahankan kepentingan nasional dalam ruang lingkup dunia Internasional. Definisi politik luar negeri menurut Rosenau adalah upaya suatu negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya. (Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, 2005, hal. 47-49) Sedangkan menurut ilmuwan politik Charles Herman, konsep kebijakan luar Negeri adalah tindakan-tindakan yang merupakan tindakan resmi para pembuat keputusan yang berwenang dalam pemerintah suatu negara ataupun lembaga-lembaga mereka yang dimaksudkan untuk mempengaruhi para aktor Internasional yang berada di luar Negara mereka.

Suatu negara lazimnya berusaha mewujudkan tujuan nasionalnya melalui formulasi kebijaksanaan politik luar negeri. Dalam hal ini Holsti berpendapat bahwa: Kebijakan, sikap atau tindakan suatu negara merupakan output politik luar negeri dengan berlandaskan pemikiran, serta pola tindakan yang disusun oleh para pembuat keputusan untuk (1) menanggulangi permasalahan, (2) mengusahakan perubahan dalam lingkungan internasional. (Holsti, 1992, hal. 21)

Dalam aplikasinya, politik luar negeri dilakukan setelah adanya penetapan kebijaksanaan dan keputusan dari pemerintah dan instansi-instansi ataupun lembaga-lembaga terkait, baik dalam kapasitas sebagai konseptor

maupun eksekutor kebijakan. Dalam konteks ini, pemerintah juga harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada faktor-faktor nasional sebagai faktor internal seperti aspirasi konstituen domestik, elemen masyarakat sipil (*civil society*), dan faktor-faktor internasional sebagai faktor eksternal seperti peta kepentingan-kepentingan kekuatan internasional. Di samping itu, dalam pelaksanaan politik luar negeri harus memilih teknik atau instrumen yang cocok untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan yang disesuaikan dengan kekuatan nasional (*national power*).

Dalam hal ini, jika melihat sikap Indonesia dalam menghadapi krisis diplomatic Qatar tentu tidak terlepas dari adanya kepentingan domestik Indonesia. Salah satu sikap Indonesia adalah Presiden Jokowi sudah memutuskan untuk mengambil peran dalam penyelesaian krisis diplomatik Qatar tersebut. Melihat dari banyaknya kerjasama antara kedua negara baik dari segi perdagangan dan investasi serta tenaga kerja, menjadi salah satu tujuan ataupun pertimbangan Jokowi untuk mengambil sikap dalam krisis diplomatik ini. (Waluyo, Indonesia Siap Ambil Peran Solutif Krisis Qatar, 2017)

Berdasarkan konsep politik luar negeri menurut K.J. Holsti, sikap Indonesia dalam menghadapi krisis diplomatik Qatar di kawasan Timur Tengah tentu bertujuan untuk menanggulangi permasalahan dan mengusahakan perubahan lingkungan Internasional. Hal

ini sangat terlihat dari tindakan Jokowi yang telah melakukan komunikasi melalui via telepon dengan pemerintah-pemerintah Negara lain, salah satu diantaranya adalah Presiden Erdogan. Komunikasi tersebut dilakukan untuk membahas krisis Qatar dan menjari jalan ataupun solusi dalam menyelesaikan krisis diplomatik yang tengah berlangsung tersebut. (BBC News, 2017)

## 2. Konsep Diplomasi

Kata diplomasi dalam ruang lingkup hubungan internasional tidak akan terlepas dari kata politik luar negeri. Hal ini dikarenakan keduanya memiliki tujuan dan fungsi yang sama yaitu untuk melindungi dan memajukan kepentingan nasional suatu negara. Tetapi, di sisi lain politik luar negeri dan diplomasi merupakan dua hal yang berbeda yaitu jika politik luar negeri itu lebih berkaitan dengan perumusan suatu keputusan, maka diplomasi dihubungkan dengan pelaksanaan dari keputusan yang diambil oleh suatu negara. Tak dapat dipungkiri diplomasi sangat identik dengan hubungan antar negara. Seperti yang dikemukakan oleh KM Panikkar dalam bukunya *The Principle and Practice of Diplomacy*, ia mendefinisikan diplomasi sebagai seni untuk mengedepankan kepentingan suatu negara dalam hubungan suatu negara dengan negara-negara yang lain. Selain itu, dalam definisi diplomasi menurut Sir Ernest Satow, diplomasi diartikan sebagai aplikasi dari intelijen dan taktik ataupun strategi untuk menjalankan hubungan resmi

antara pemerintahan yang berdaulat kemudian diperluas hubungan negara tersebut dengan hubungan negara-negara jajahannya. (Satow, 1922, hal. 1) Definisi tersebut, jelaslah bahwa diplomasi menyangkut aspek yang sangat luas, baik mengenai cara, kebijakan, orang, lembaga maupun profesi. Namun diplomasi ini pada umumnya merujuk pada seni, teknik dan cara bagaimana kita mengadakan pendekatan ataupun perundingan (negosiasi) untuk memperjuangkan kepentingan nasional suatu negara dan langkah-langkah yang di ambil untuk mengamankan kepentingan tersebut, disamping membina hubungan dan kerjasama yang baik dengan Negara-negara lain. Senada dengan definisi Satow, Barston mendefinisikan diplomasi sebagai manajemen hubungan antar negara atau hubungan antar negara dengan aktor-aktor hubungan internasional lainnya. Dalam hal ini negara dengan melalui perwakilan resmi dan aktor-aktor lain berusaha untuk menyampaikan, mengkoordinasikan, dan mengamankan kepentingan nasional. Hal itu dilakukan melalui korespondensi, pembicaraan tidak resmi, saling menyampaikan cara pandang, lobby, kunjungan, dan aktivitas-aktivitas lainnya yang terkait. (Barston, 1997, hal. 1) Meskipun diplomasi berhubungan dengan aktivitas-aktivitas yang damai seperti negosiasi, diplomasi juga terjadi di dalam kondisi perang atau konflik bersenjata, karena tugas utama diplomasi tidak hanya manajemen konflik, tetapi juga manajemen perubahan dan pemeliharaannya dengan cara melakukan persuasi, menawarkan penghargaan,

saling menukar konsesi, atau mengirim ancaman. (Watson, 1984, hal. 223)

Studi diplomasi mengalami perkembangan pesat sejak berakhirnya perang dingin. Perubahan disebabkan meningkatnya peran aktor-aktor bukan negara pada era 1990-an, seperti media massa, NGO internasional dan individu. Hal ini menyebabkan negara bukan lagi sebagai aktor utama diplomasi maupun faktor utama pendukung kepentingan nasional. Revolusi teknologi menjadikan aktivitas diplomasi tidak lagi menjadi suatu tugas bagi diplomat profesional, melainkan sudah menjadi tugas bagi masyarakat luas untuk mewujudkan kepentingan kelompok khususnya kepentingan negaranya. Keterlibatan masyarakat luas melalui diplomasi publik ini merupakan sebuah kecenderungan baru di era globalisasi yang ditujukan sebagai ungkapan kepedulian dan tanggung jawab terhadap masalah-masalah yang terkait dengan kebijakan luar negeri dan perdamaian dunia. Revolusi tersebut mengakibatkan adanya perubahan penting dalam praktik diplomasi khususnya dalam peran diplomat dan peran Departemen Luar Negeri. Selain itu, terdapat peningkatan peran media massa, tumbuhnya aktor-aktor yang menjalankan diplomasi publik, serta meningkatnya peran NGOs dan INGOs. (Djelantik, 2008, hal. 15)

Seperti yang dikemukakan oleh Barry Fulton mengenai perubahan-perubahan dalam praktik diplomasi, ia mengatakan bahwa negara-negara sebelumnya terhubung oleh Departemen Luar Negeri dan

aktivitas perdagangan, sekarang terhubung melalui berjuta-juta individu dengan memakai saluran serat optik, satelit, telepon tanpa kabel, dan dengan kabel di dalam sebuah jaringan yang kompleks tanpa pengawasan terpusat. Selain adanya revolusi teknologi informasi yang menuntut perubahan dalam praktik diplomasi, perubahan-perubahan lain yang terjadi adalah meningkatnya peran media massa, globalisasi bisnis dan keuangan, meningkatnya partisipasi masyarakat di dalam kegiatan hubungan internasional, dan masalah-masalah kompleks yang menghapus batasan nasional suatu negara. (Fulton, 1998, hal. 8)

Dalam perkembangannya, terdapat berbagai jenis diplomasi, yaitu *preventive diplomacy*, *offensive diplomacy*, diplomasi rahasia, dan *public diplomacy*. *Preventive diplomacy* memiliki tujuan untuk meredakan berbagai pihak yang terlibat dalam masalah agar tidak menimbulkan perang. Diplomasi preventif biasanya dilakukan oleh negara-negara yang memiliki power menengah ke bawah untuk menghindari campur tangan dari negara super power. Diplomasi jenis ini dilakukan dengan berbagai metode dan cara yang damai agar permasalahan dapat terselesaikan tanpa adanya kekerasan. Diplomasi yang kedua adalah *offensive diplomacy*. *Offensive diplomacy* merupakan teknik diplomasi yang menggunakan tekanan, paksaan, serta ancaman terhadap pihak lain. Dengan menggunakan cara-cara yang memaksa dan menekan mengakibatkan suatu pihak tunduk dan patuh kepada pihak lainnya.

Ancaman dan tekanan tersebut bisa dalam bentuk embargo ekonomi, pemberhentian bantuan, ancaman militer ataupun sanksi perdagangan. Diplomasi ketiga adalah diplomasi rahasia yang dilakukan secara diam-diam oleh pemerintah dari suatu negara dan diplomasi ini dirahasiakan dari publik. Diplomasi rahasia berkembang pada masa abad pertengahan dan biasa digunakan oleh kerajaan-kerajaan, khususnya di Eropa. Kelebihan dari diplomasi ini adalah terjaminnya rahasia dan masalah dapat diselesaikan dengan cepat. Jenis diplomasi yang keempat adalah *public diplomacy* yang biasanya digunakan pemerintah untuk membentuk opini publik dan bertujuan untuk mendapat simpati dan dukungan rakyat. Dengan demikian, *public diplomacy* adalah proses diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat di negaranya, atau kepada masyarakat di negara lain. (Djelantik, 2008)

Di era reformasi saat ini juga memiliki beragam jenis diplomasi lainnya, salah satunya adalah diplomasi total. Hakikatnya diplomasi total ini merupakan bentuk negosiasi yang dilakukan oleh suatu negara dengan melibatkan banyak pihak dari setiap komponen yang ada di suatu negara, yaitu tidak menggunakan keterlibatan pemerintah dengan aktor pemerintah sebagai satu-satunya cara untuk berdiplomasi, akan tetapi diplomasi total ini juga melibatkan pihak swasta melalui jaringan-jaringan informal. Konsep diplomasi total ini pernah dikemukakan oleh Mohammad Hatta pada awal periode

kemerdekaan, akan tetapi mulai ramai dibahas pada masa Noer Hassan Wirajuda menjabat sebagai pemimpin Kementerian Luar Negeri RI tahun 2001-2009. Total diplomasi memiliki banyak kontribusi berupalangkah kreatif dan inovatif yang dikembangkan oleh semua komponen bangsa. Implementasi dari total diplomasi ini didasarkan pada asumsi yang sederhana; yaitu pemerintah tidak dapat berdiri sendiri untuk mengatasi berbagai tantangan dalam isu-isu Internasional yang semakin kompleks dan rumit sehingga menuntut keterlibatan banyak stakeholder.

Banyaknya stakeholder yang dilibatkan oleh suatu negara dalam total diplomasi, pemerintah suatu negara yakin dan percaya bahwa upaya diplomasi akan berjalan lebih efektif dan memberikan dampak yang lebih luas pada masyarakat internasional. Harapan pemerintah dalam keterlibatan banyak stakeholder, dapat membuka jalan ataupun memberikan solusi awal bagi negosiasi yang lebih fokus oleh wakil-wakil pemerintah. Hal ini dikarenakan, jika proses diplomasi tradisional masih dilakukan dan dikembangkan melalui mekanisme *government to government relations*, maka total diplomasi ini menawarkan suatu solusi yang lebih efektif dalam aktivitas berdiplomasi yaitu dengan menambahkan stakeholder yang lainnya seperti pada *government to people* bahkan pada *people to people relations*. Tujuan dari total diplomasi adalah agar masyarakat internasional mempunyai persepsi ataupun pandangan yang baik tentang suatu negara yang dapat

dijadikan sebagai landasan sosial bagi hubungan dan pencapaian kepentingan yang lebih luas. Tujuan lainnya dari diplomasi total adalah untuk mengurangi atau menyelesaikan konflik melalui pemahaman komunikasi dan saling pengertian serta mempererat jalinan hubungan antar-aktor internasional sehingga ketegangan, kemarahan, ketakutan, dan salah persepsi dapat diminimalisir atau dikurangi, selain itu juga dapat menambah pengalaman dalam berinteraksi, mempengaruhi pola pikir dan tindakan pemerintah dengan menjelaskan akar permasalahan, perasaan, kebutuhan, dan mengeksplorasi pilihan-pilihan diplomasi tanpa prasangka, dan tujuan terakhir adalah untuk memberikan landasan bagi terselenggaranya negosiasi-negosiasi yang lebih formal serta merancang kebijakan pemerintah. Walaupun dalam diplomasi total melibatkan banyak aktor, tetapi faktanya Kementerian Luar Negeri tetap harus memegang peran sentral. Tujuannya agar peran diplomat tidak terdegrasi meskipun secara *de facto* diplomat tidak dapat berdiri sendiri. (Wangke, 2016, hal. 5-7)

Berdasarkan konsep diplomasi yang dikemukakan oleh sir Ernest Satow dan Barston, upaya-upaya Indonesia dalam mendukung penyelesaian krisis diplomatik Qatar merupakan serangkaian strategi diplomasi yang tentunya tidak terlepas dari adanya kepentingan nasional. Dalam hal ini dengan banyaknya kerja sama antara Indonesia dan Qatar, menghantarkan pemerintah resmi khususnya presiden Jokowi ikut

berpartisipasi dalam penyelesaian krisis ini. Seperti halnya yang telah dilakukan oleh presiden Jokowi yaitu berkomunikasi dengan presiden Turki dan Menteri Luar Negeri Qatar untuk membahas tentang krisis Qatar dan penyelesaiannya. Selain presiden, Bu Retno Marsudi sebagai menteri luar negeri juga telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan krisis diplomatik Qatar, yaitu dengan melakukan pertemuan dengan berbagai pemerintah dari negara lain untuk membahas penyelesaian krisis Qatar. Sejak krisis Qatar mengemuka, Menlu Retno telah melakukan upaya komunikasi dengan sejumlah Menlu dari negara kunci, seperti Arab Saudi, UEA dan Qatar yang menjadi pihak dalam konflik, maupun dengan Menlu lainnya, antara lain Uni Eropa, Jerman, Turki, Kuwait, dan Iran yang dipandang dapat berkontribusi terhadap penyelesaian konflik. (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2017)

Merujuk pada perkembangan diplomasi yang telah dikemukakan sebelumnya, Indonesia saat ini juga meranah pada arah diplomasi total yang tidak hanya melibatkan aktor-aktor pemerintah saja, tetapi juga melibatkan *non state actor*. Keterlibatan dari pihak pemerintah khususnya Kementerian Luar Negeri dapat terlihat dari adanya sikap dari duta besar Indonesia untuk Qatar yang telah melakukan kunjungan dan komunikasi terhadap WNI yang berada di Qatar untuk memastikan dan memberikan perlindungan terhadap WNI selama krisis. Selain itu, adanya kunjungan delegasi RI yaitu wakil ketua DPR RI, Fadli Zon ke doha untuk melakukan

pertemuan dengan menteri luar negeri Qatar dalam rangka membahas krisis Qatar dan arah kerjasama antara Indonesia dan Qatar selama krisis diplomasi Qatar berlangsung. Sedangkan untuk keterlibatan dari *non state actor* dapat dilihat dari adanya suara atau tanggapan dari ketua MUI yang merupakan organisasi islam yang berpengaruh di Indonesia. Beliau menyarankan kepada pemerintah agar solutif dalam menyelesaikan krisis diplomatik Qatar. Tidak hanya menyarankan saja, tetapi beliau pun menekan pemerintah Indonesia khususnya presiden agar sebaiknya Indonesia mengambil sikap sebagai fasilitator dalam krisis diplomatik ini dan tidak sebagai mediator. Hal ini dikarenakan masyarakat muslim yang dominan di Indonesia, sehingga akan lebih efektif jika Indonesia menyediakan fasilitas untuk pertemuan pemerintah-pemerintah yang bersengketa agar dapat mencapai satu kesepakatan damai untuk krisis diplomatik Qatar.

#### **D. Hipotesa**

Kebijakan Indonesia dalam menghadapi krisis diplomatik Qatar yang berada di kawasan Timur Tengah tahun 2017 menggunakan total diplomasi yang tidak hanyamelibatkan aktor pemerintah saja, tetapi juga melibatkan *non state actor* seperti ketua dewan pertimbangan MUI.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Penulisan proposal skripsi ini yang berjudul “Kebijakan Indonesia dalam menghadapu krisis

diplomatiK Qatar di Timur Tengah tahun 2017” memiliki tujuan yang hendak dicapai oleh penulis berupa :

- Untuk memberikan pemahaman atau pengetahuan mengenai kebijakan Indonesia dalam menghadapi krisis diplomatiK Qatar di Timur Tengah Tahun 2017
- Untuk menambah pengetahuan di bidang studi kawasan Timur Tengah, studi diplomasi, dan studi politik luar negeri Indonesia.

#### **F. Metode Pengumpulan dan Analisis Data**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode umum dalam mengolah data dari sumber-sumber sebagai berikut:

- Studi literatur atau *Library research*, metode ini digunakan sebagai data sekunder untuk mempelajari sumber-sumber yang relevan dalam rangka menganalisis masalah.
- Studi media massa atau *Media research*, yaitu mengumpulkan data dari berbagai media massa seperti internet, koran, majalah, jurnal dan lain sebagainya untuk menemukan referensi lain sebagai sumber data.

#### **G. Jangkauan Penelitian**

Pada penulisan proposal skripsi ini penulis ingin membatasi jangkauan penelitian penulis dengan meneliti sikap Indonesia dalam upaya penyelesaian krisis diplomatiK Qatar di Timur Tengah tahun 2017 sampai dengan akhir tahun 2018. Dimana pada tahun 2017 krisis

diplomatiq Qatar mulai berlangsung dan pada akhir tahun 2018 menjadi tahun mulai meredanya krisis diplomatiq Qatar. Batasan penelitian ini menghindari adanya kompleksitas observasi dan analisis.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan dalam karya ilmiah ini, sebagai berikut:

Bab I berisi tentang gambaran masalah yang dijadikan penelitian, rumusan permasalahan yang akan dibahas; landasan teoritik untuk menganalisa permasalahan; hipotesa yang memuat jawaban umum dalam skripsi; jangkauan penelitian yang memuat batasan waktu dari permasalahan; metode pengumpulan dan analisis data yang memuat cara-cara untuk digunakan; serta sistematika penulisan yang berisi tentang garis besar isi penulisan.

Bab II berisi tentang gambaran negara Indonesia dalam hal politik luar Negeri. Dalam bab ini juga memberikan gambaran tentang perekonomian Indonesia termasuk juga kondisi ekonomi Indonesia setelah dilakukannya kerjasama perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Qatar. Selain itu, dalam bab ini juga memberikan gambaran mengenai luas wilayah Indonesia.

Bab III berisi penjabaran tentang krisis diplomatiq Qatar di Timur Tengah tahun 2017. Dalam bab ini juga memberikan penjabaran tentang kronologi terjadinya krisis, termasuk dampak secara umum yang akan dirasakan oleh Negara-negara lain, diantaranya

adalah Indonesia yang sudah lama menjalin hubungan kerjasama dengan Qatar di beberapa bidang.

Bab IV berisi penjelasan tentang kebijakan Indonesia dalam menghadapi krisis diplomatik Qatar di Timur Tengah tahun 2017. Pada bab ini juga akan dipaparkan implikasi dari kebijakan Indonesia terhadap dampak-dampak yang akan dirasakan akibat dari adanya krisis diplomatic Qatar

Bab V berisi tentang kesimpulan dari penelitian

